



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MANAJEMEN KENDARAAN BERMOTOR DI RUMAH  
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I  
PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2014**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**SKRIPSI**

Oleh :

**GENNY PRATAMA**

**NIM. 11720714842**

**UIN SUSKA RIAU**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul *“Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014”* yang ditulis oleh:

Nama : GENNY PRATAMA

NIM : 11720714842

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2021  
Pembimbing Skripsi

**Hellen Last Fitriani, S.H, M.H**  
NIK. 130 217 121

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2014"* yang ditulis oleh :

Nama : **GENNY PRATAMA**  
 NIM : 11720714842  
 Program Studi : Ilmu Hukum S1

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : ONLINE

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

Sekretaris  
**Basir, SHL, MH.**

Penguji I  
**Dr. Muhammad Darwis, SHL, MH.**

Penguji II  
**Dr. Mahmuzar, M.Hum.**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005





1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ganny Pratama (2021) : Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014**

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru ini memang cukup banyak barang sitaan kendaraan bermotornya. Pada Sitaan kendaraan bermotor yang dititip di Rupbasan belum terawat dengan maksimal, sehingga membuat pengelolaannya menimbulkan beberapa hambatan yang terjadi pada pengelolaan basan dan baran kendaraan bermotor di Rupbasan Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok.

Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014. Apa hambatan pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, di mana Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada ahirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah.

Dari hasil penelitian dapat di dilihat bahwa Pengelolaan Kendaraan Bermotor sudah terlaksana cukup baik. Namun masih banyak hal yang harus benahi. Dalam hal pemeliharaan kita dapat mengetahui bahwa pemeliharaan berjalan cukup maksimal dikarnakan adanya kelebihan benda sitaan Kendaraan Bermotor sehingga untuk pemeliharaannya kurang maksimal. Dalam hal jangka waktu pengelolaan berjalan kurang maksimal dikarnakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara hanya sebagai tempat penitipan barang sitaan Negara dan sifatnya tidak memiliki kuasa untuk mengeluarkan benda sitaan Negara tersebut, selain itu juga dikarnakan benda sitaan Negara tersebut belum memiliki kekuatan kepemilikan benda secara yuridis. Hambatan pengelolaan Kendaraan terkendala waktu penerimaannya dikarnakan proses surat menyurat yang belum dilengkapi oleh pihak penitip. berupa jumlah barang antara barang yang diterima dan dikeluarkan tidak seimbang.

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Pengelolaan Kendaraan Bermotor sudah terlaksana cukup baik. Hambatan pengelolaan Kendaraan terkendala waktu penerimaannya. Selain itu jumlah barang antara barang yang diterima dan dikeluarkan tidak seimbang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat Rahmatnya dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul **“PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2014 ”**.

Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong kedalam orang-orang ahli surga, Aamiin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak panyak pihak yang dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga di bawah kepemimpinannya UIN Suska menjadi *Word Class University* segera terwujud.
2. Bapak Dr, Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga Fakultas Syariah dan Hukum menjadi Fakutas teladan.
3. Bapak Firdaus, SH.,MH selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum serta buat Bapak Muslim, S.Ag, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ibu Helen Last Fitriani, SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah membuka pemikiran dan menunjukkan jalan kepada penulis untuk melakukan penelitian yang baik dan benar.
5. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
6. Semua Bapak/Ibu Guru penulis serta Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh staf pegawai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak Petrus Bambang Sugiarto S. I Kom selaku Kasubsi Admintrasi dan Pemeliharaan. Kak Fitri Oktaviani selaku Staf Admintrasi dan Pemeliharaan yang telah berkerjasama dalam memberikan data serta informasi untuk kelengkapan tulisan skripsi ini.
8. **TERUTAMA** buat Ibu Ku Elvida Susanti dan Ayah Ku Muhammad Isis S. Sos tercinta yang telah bersusah payah untuk membiayai serta memberi dorongan moril dan materil yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Adik Kandung Ku Ayunda Arih Sistianty Trimakasih untuk kehangatan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
10. Trimakasih Kepada senior Bang Bowo Wiguna S.H dan Bang Endriyanto S.H yang telah banyak menunjukkan dan membuka pemikiran penulis selama melakukan penelitian ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2017 Utri, Nanang Nurhadi, Asyraf, Rahmat Fadilah, Rizky Alfarizi, Caca, Tari, Zedri dan nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

12. Teman-teman Forum Remaja Masjid Al-Muhajirin (FORMAL) Handika, Dita, Kak Mila, Bang Ilham, Bang Lutfi, Bang Wahyu, Kak Ika yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat serta kasih sayang dan amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

**Pekanbaru, Juni 2021**

**Penulis**

**Genny Pratama**  
**NIM: 11720714842**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
A. Sejarah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru.....	14
B. Visi dan Misi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru .....	17
C. Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Kelas I Pekanbaru.....	18
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru .....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Umum Pengelolaan .....	21
B. Kendaraan Bermotor .....	25
C. Tinjauan Tentang Benda Sitaan dan Barang Rampasan.....	27
D. Tinjauan Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan	





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara.....	30
E. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014.....	34
B. Hambatan pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. 1 : Populasi dan Sampel .....	10
Tabel 2. 1 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pangkat Dan Golongan Pada Rupbasan Kelas I Pekanbaru .....	20
Tabel II. 2 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru.....	20



## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diberikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya oleh karena itu, perbuatan hukum seharusnya mampu mengeleminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah masyarakat juga harus bersendikan pada keadilan dan keduanya belum lengkap jika hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan.<sup>2</sup> Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, 2004, Jakarta, hlm. 72

<sup>2</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru, Kalimedia, 2017), h53

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Liberty, 1999, hlm 71.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil Amandemen disebutkan bahwa: negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup> Tentu saja konsep “negara hukum” adalah sebuah konsep atau ide yang merupakan *basic demand* dari sebuah bangsa. Hal ini terlihat bahwa dari seluruh negara yang ada di dunia, tidak ada yang tidak mencantumkan dalam dasar negara tentang konsep hukum, baik itu negara yang mempunyai basis ideologi komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun yang lainnya.<sup>5</sup> Secara etimologi, kata negara dalam pengertian sekarang dalam arti sistem fungsi dan segenap organ umum (Lembaga Negara) yang tersusun menurut tata hukum yang berada dalam suatu wilayah.<sup>6</sup>

Peraturan tersebut memang tepat apabila dicabut dan tidak diberlakukan lagi, karena tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu disahkannya KUHAP itu adalah untuk tujuan yang lebih baik karena memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum sehingga di dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup>

Dengan demikian untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang lengkap, namun walaupun KUHAP tersebut dapat disebut karya besar dan disamping itu juga telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan petunjuk dari Mahkamah Agung

<sup>4</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyaarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1-2

<sup>5</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Ilmu Negara*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 19

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>7</sup> L. Summartini, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta 1995/1996), hlm. 2





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta diadakan pertemuan dalam forum Mahkejapol, namun dalam pelaksanaannya masih perlu penegasan, penjelasan lebih lanjut agar kesenjangan yang dihadapi dapat ditutupi kekurangannya.<sup>8</sup>

Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata dan disusun sedemikian rupa, dan aturan itu antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menentukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut :<sup>9</sup>

“Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain, sebab hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Dalam arti, jika tidak ada hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi”

Dalam perkembangannya lahir Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara”.<sup>10</sup>

Yang dimaksud penyitaan adalah mengalihkan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang untuk kepentingan penyidikan dan

<sup>8</sup> *bid.*, hlm. 3

<sup>9</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15-16

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penuntutan.<sup>11</sup> Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (pasal 38 ayat (1) KUHAP).<sup>12</sup> Mengenai penyitaan benda dalam hal tertangkap tangan tidak perlu harus mendapat izin dari ketua Pengadilan Negeri, tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.<sup>13</sup>

Pengertian Penyitaan merupakan serangkaian aksi penyidik untuk mengambil alih serta ataupun menyimpan dibawah penguasannya barang bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, serta peradilan. Dari penafsiran tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian.

Barang sitaan yang sudah disita oleh penyidik wajiblah dilindungi dengan sebaik-baiknya agar benda tersebut tidak merugikan pemilik benda tersebut sebab apabila barang sitaan rusak atau lenyap maka bisa termasuk suatu pelanggaran terhadap hak kepemilikan kebendaan seseorang oleh Negara. Dalam hal Pengelolaan Barang Sitaan, Negara mempunyai suatu unit Pelaksana Teknis yang

<sup>11</sup> A. Hamzah Dan Irdan Dahlan, *Perbandingan Kuhap Hir Dan Komentar*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), hlm. 77

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 145

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 168

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fokus dalam perihal Pengelolaan Benda Sitaan dari suatu Tindak Pidana yaitu Rumah Barang Sitaan Negara atau lebih diketahui dengan RUPBASAN.

Cara penyimpanan diserahkan pada kebijakan Kepala Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Di dalam menjalankan fungsi kebijakan penyimpanan, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) berpedoman kepada ketentuan pasal 1 ayat (5) peraturan Menteri Kehakiman No. M. 05-UM.01.06/1983, yang memberi petunjuk, jika benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dapat menguasai penyimpanannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan. Yang penting diperhatikan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam pemberian kuasa penyimpanan tersebut: keselamatan dan keamanan benda sitaan dapat terjamin. Jaminan keselamatan yang menjadi faktor pemberian kuasa penyimpanan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab secara fisik benda sitaan.<sup>14</sup>

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Di samping itu, yang terpenting

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 278

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam jangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>15</sup>

Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru ini memang cukup banyak barang sitaan kendaraan bermotornya, bahkan ada barang yang sudah lama dari Tahun 2008 pun ada yang tidak diambil dan biasanya barang itu dilelang. RUPBASAN Kelas I Pekanbaru ini terletak di Jalan. Sialang Bungkok, Kulim, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Kode Pos 28286.<sup>16</sup> Dan berada di lingkungan RT 02 RW 15 Kelurahan Sail, Pekanbaru.<sup>17</sup>

Pada Sitaan kendaraan bermotor yang dititip di Rupbasan belum berjalan dengan maksimal, sehingga membuat pengelolaan dan menimbulkan beberapa hambatan yang terjadi pada pengelolaan di Rupbasan Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan judul **“PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2014”**

<sup>15</sup> Abu Samah, Hukum Pemda dan Otonomi Daerah (Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2019) h 27

<sup>16</sup> Wawancara dengan Desi, tanggal 22 Februari 2021 di Kantor RUPBASAN Kelas I Pekanbaru

<sup>17</sup> Wawancara dengan Syahrial, tanggal 22 Februari 2021 di Tempat Kegiatan Usaha

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Batasan Masalah**

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014?
2. Apa hambatan pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bungkuk Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014.

b Untuk mengetahui apa hambatan Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkuk.

#### E. Manfaat Penelitian

##### 1. Secara Akademis

Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

##### 2. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014.

##### 3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru.



## Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>18</sup> Meneliti efektifitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yaitu di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Jln. Sialang Bungkok, Kulim, Pekanbaru.

### 3. Jenis Data

- a) Data Primer, berupa data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari subjek penelitian melalui wawancara. Kepala RUPBASAN, Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan dan beserta staf
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dari buku-buku literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), hlm. 33

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Rineka Grafindo Persada, 2008), hlm. 30

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber hukum lainnya. Di dalam sumber bahan hukum sekunder terbagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>20</sup> Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 23 orang pihak pengelola benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil sampel Kepala RUPBASAN, Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan beserta Staf dan dengan menggunakan *purposive sampling*.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007), hlm. 118

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 119



**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan Sampel**

	NAMA	POPULASI	SAMPEL	PERSEN TASE
	Kepala RUPBASAN Kelas I Pekanbaru	1	1	100%
	Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan	1	1	100%
	Staf	21	5	23,8%
	Total	23	7	30,4%

## 5. Metode pengumpulan data

### a. Observasi

Penelitian mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

### b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.<sup>22</sup> Subjek wawancara dari penelitian ini adalah Kepala RUPBASAN, Ka. Subsidi Administrasi dan Pemeliharaan beserta staf.

### c. Tinjauan Pustaka

Merupakan suatu bentuk penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian ini menitik beratkan pada pencarian data/informasi

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 138

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

d. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

**G. Sistematika Penulisan**

Supaya memberikan pemaparan antara lain, pembahasan ini dikemukakan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan struktur organisasi RUPBASAN dan Gambaran lokasi penelitian yaitu Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru.

**BAB III: TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan diuraikan yang berkaitan dengan judul Penelitian yaitu tentang pengertian Rumah Penyimpanan Benda



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN),  
Tugas dan fungsi Kepala RUPBASAN,  
Pengelolaan dan penyimpanan barang sitaan Negara.

**BAB IV:**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. Meliputi Pembahasan yang mencakup tentang Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 dan Hambatan Pengelolaan Kendaraan Bermotor DI Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok.

**BAB V:**

**PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan Dengan hasil penelitian.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Sejarah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru yang pertama kali dibentuk semula berkantor di salah satu ruangan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Riau yaitu Agustus 2001 dan kemudian baru pada bulan Desember tahun 2002 kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru mempunyai gedung sendiri yang juga masih bersifat sementara (rumah dinas dijadikan kantor) dengan luas bangunan  $90 \text{ M}^2$  dan halaman sekitar  $200 \text{ M}^2$ . Sehingga semua kegiatan operasional kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru yang menyangkut tugas pokok dan fungsi tidak dapat berjalan optimal karena sarana tempat penyimpanan yang tidak tersedia, sedangkan pembangunan gedung kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang sesungguhnya baru dimulai pada tahun anggaran 2005 yang dikerjakan secara bertahap hingga pada tahun 2008.

Barulah pada akhir tahun 2008 pembangunan gedung kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru telah selesai 100% dan secara fisik dapat digunakan secara optimal, namun penyelesaian pembangunan tersebut belum diselesaikan sesuai dengan kebutuhannya, seperti pembuatan pagar depan kantor dan pagar keliling. Pada tanggal 14 April 2008 Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korfas I telah menempati gedung baru tersebut yang mempunyai luas bangunan 1776 M<sup>2</sup> (dua lantai) yang didalamnya terdapat gudang penyimpanan dan ruang perkantoran, dengan demikian operasional kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru dapat dilaksanakan secara optimal walaupun masih bersifat penyimpanan secara tertutup.

Selanjutnya halaman disekitar gedung tersebut belum tertata dengan baik masih membutuhkan penyempurnaan sehingga penyimpanan secara terbuka belum dapat dilaksanakan. Namun demikian pada tahun anggaran 2008 lalu pembangunan kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sudah selesai dikerjakan pembangunannya hanya tinggal sarana pendukung seperti infrastruktur yang belum diselesaikan seperti pagar depan dan keliling dan halaman depan serta lahan disekitar lingkungan kantor, yang masih berupa tanah timbun belum ada pengerasan, kemudian pada tahun 2008 diadakan pembangunan gudang terbuka yang baru pada tahap pondasi saja yang diharapkan keseluruhan faktor pendukung tadi dapat dianggarkan pembangunannya pada tahun 2009 ternyata pada tahun 2009 ini Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru tidak mendapat alokasi dana pembangunan.

Sebagai tindak lanjut telah digunakannya gedung kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru yang baru telah dilakukan koordinasi kepada Instansi terkait bahwa RUPBASAN Pekanbaru dapat menerima berbagai macam barang sitaan dengan jumlah yang tidak terbatas.

Hal ini dalam rangka mewujudkan sistem tata peradilan pidana yang terintegrasi dan terkoordinir. Pada tahun 2011 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru mendapat alokasi dana untuk pembangunan gudang/Los penyimpanan barang yang terpisah dari gedung utama dan saat ini gudang tersebut telah digunakan untuk penyimpanan barang dari sitaan dari instansi terkait.sedangkan untuk pengamanannya saat ini sudah memadai karena saat ini Rupbasan Kelas I Pekanbaru mendapat Proyek Pembangunan APBN-P tahun Anggaran 2017 berupa Pagar Keliling untuk mendukung sarana dan prasarana keamanan kantor dilengkapi dengan CCTV dan Pos Pengamanan Jaga tepatnya didepan pintu masuk gedung kantor. Ruang pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru :

1. Ruang Kepala
2. Ruang Kasubsi Pengamanan dan Pengolahan
3. Ruang Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan
4. Ruang Tata Usaha
5. Ruang Staf Pengelola Keuangan
6. Ruang Staf Pengelola Administrasi dan Pemeliharaan
7. Ruanagan Pengamana
8. Ruang AULA
9. Ruang Darma Wanita
10. Ruang Mushollah
11. Dapur
12. Ruang SDP Sistem Data Permaryarkatan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Serta Gudang Basan Baran yang berjumlah 7 Gudang<sup>23</sup>

## Visi Dan Misi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru

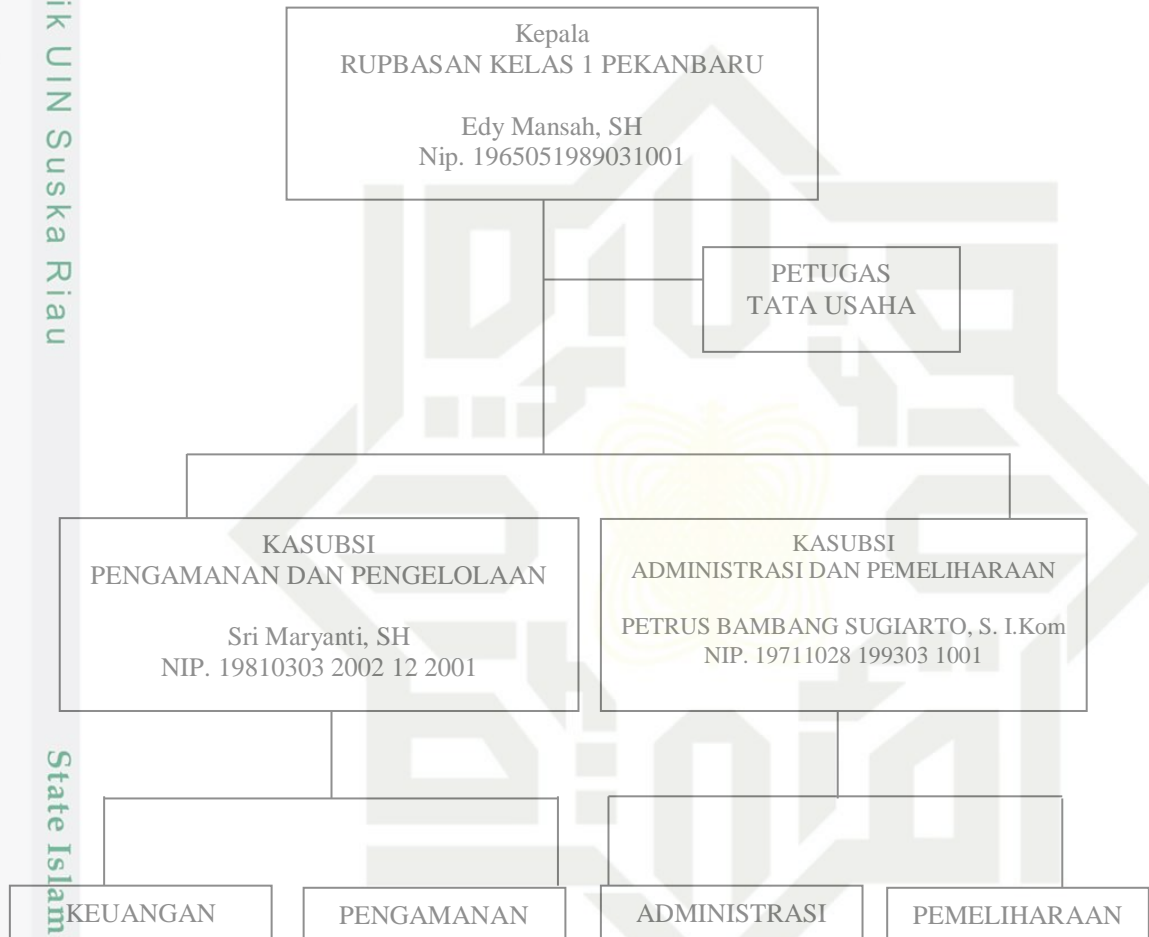
1. Visi : Mewujudkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang unggul dan terdepan dalam kinerja dan dalam rangka penegakan hukum, pemenuhan hak asasi manusia , serta penyelamatan asset Negara
2. Misi
  - 1) Menyelenggarakan penerimaan, penelitian, penilaian, pengidentifikasian, registrasi, pengklarifikasian, serta penempatan benda sitaan.
  - 2) Menyelenggarakan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada gudang – gudang yang tersedia.
  - 3) Menyelenggarakan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan secara efektif,efisien, serta berkelanjutan
  - 4) Menyelenggarakan pengamanan serta penyelamatan benda sitaan dan barang rampasan
  - 5) Menyelenggarakan pemutasian benda sitaan dan barang rampasan
  - 6) Menyelenggarakan pengeluaran benda sitaan dan baran rampasan sesuai prosedur yang berlaku.
  - 7) Menyelenggarakan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan berbasis IT.

<sup>23 18</sup>file:///F:/New%20folder/Sejarah%20Singkat%20Pembentukan%20Rupbasan%20Kelas%20I%20Pekanbaru%20E2%80%93%20Rupbasan%20Pekanbaru.htm



- 8) Menjalin sinergitas antar penegak hukum dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkepastian.

### Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Kelas I Pekanbaru



### D. Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas

#### I Pekanbaru

RUPBASAN memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan basan dan baran. Selain itu, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) juga memiliki fungsi dalam melaksanakan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan, melakukan pemeliharaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemutasian benda sitaan dan barang rampasan, melakukan pengamanan dan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

serta melakukan urusan tatausaha

a. Tugas Pokok Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru:

- Melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
- Melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud.
- Dikelola berarti dapat dijamin keselamatan, keutuhan, dan mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat dengan baik.

b. Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru:

- Melakukan **pengadministrasian** benda sitaan dan barang rampasan negara
- Melakukan **pemeliharaan** benda sitaan dan barang rampasan negara
- Melakukan **pengamanan** benda sitaan dan barang rampasan negara
- Melakukan surat menyurat dan kearsipan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.1****Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pangkat Dan Golongan Pada Rupbasan Kelas I Pekanbaru**

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	-
2.	Golongan III	9 Orang
3.	Golongan II	15 Orang
4.	Golongan 1	-

(Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pangkat/Golongan pegawai pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Kelas I Pekanbaru pada Golongan III sebanyak 9 Orang, dan Golongan II sebanyak 15 orang.

**Tabel II.2****Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	13 Orang
2.	Perempuan	11 Orang
Jumlah		24 Orang

(Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jenis kelamin pegawai pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru yaitu jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 13 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang.



## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengelolaan

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>24</sup>

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

##### 2. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>26</sup> Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang

<sup>24</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 695.

<sup>25</sup> Handayani, *Pengantar Studi.*, hlm. 9.

<sup>26</sup> George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 168

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:<sup>27</sup>

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala

Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

**3. Metode Pengelolaan**

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki perangkat minimal untuk memastikan *kredibilitas, integritas*, dan *otoritas* sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana

### B. Kendaraan Bermotor

#### 1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.<sup>28</sup>

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang digunakan untuk transportasi darat selain kendaraan yang berjalan di atas rel (BPS, 2013:3). Umumnya

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain juga dapat digunakan.

### 2. Fungsi Kendaraan Bermotor

Fungsi utama dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Selain itu dengan adanya kendaraan bermotor orang bisa memindahkan berbagai macam benda maupun barang dengan mudah dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar.

### 3. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), perkembangan yang terjadi pada jumlah kendaraan bermotor secara langsung memberikan gambaran mengenai kondisi subsektor angkutan darat. Jumlah kendaraan bermotor yang cenderung meningkat, merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Jenis kendaraan bermotor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

#### a. Sport

Tipe Sport adalah tipe motor yang dikhususkan untuk penggunaan balap dan kecepatan tinggi.

#### b. Standard atau Naked

Tipe ini adalah tipe berkopling dan memiliki jarak bodi dari tanah yang tinggi. Jenis ini tidak digunakan untuk ajang balap dan kecepatan tinggi namun desain bodi dan performa mesin yang lebih bertenaga dan kuat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Cruiser

Tipe ini adalah tipe yang memiliki tipe torsi mesin yang besar dan mempunyai kemampuan menarik beban besar.

d. Trail

Tipe ini dikhususkan untuk melibas medan berat misalnya medan batu dan berlumpur. Jenis ini memiliki ciri kontur ban kasar.

e. Bebek

Tipe ini adalah tipe manual tanpa kopling yang memiliki kapasitas silinder atau CC kecil. tipe ini memiliki bodi yang bercorak dari jok pengendara kebawah kemudian naik ke stang kemudi.

f. Skuter Matik

Tipe ini adalah tipe otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi, dan berkapasitas silinder atau CC kecil dan posisi pengemudi yang tegak, ukuran sepeda motor ini lebih ringan dan kecil daripada tipe bebek.

#### C. Benda Sitaan Dan Barang Rampasan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini



bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat disita meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak. pidana (ayat (1) huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank hasil korupsi.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau atau senjata api yang digunakan untuk membunuh.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan teman tersangka untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar tersangka.
4. Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat (1) huruf d), misal: kunci palsu yang dibuat tersangka untuk membuka rumah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat (1) huruf e), misal: sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik.

6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menemukannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan bendabenda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. RUPBASAN ini yang nantinya adalah satu satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. RUPBASAN secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.

Dalam Pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983 juga dijelaskan suatu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara ditempatkan di instansi yang berkaitan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, berada dibawah lingkungan departemen kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Siapapun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP. Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Pada masa lalu, banyak pejabat diantara penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. Atas alasan pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin ketertuhan berupa:

- a. Sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)
- b. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan disimpan didalam rumah penyimpanan barang sitaan negara. Yang tidak terdjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan benda sitaan yang besar-besar seperti mobil, traktor, helikopter, kapal laut, dan seterusnya, di mana disipan Menyadari hal itu, pembuat undang-undang membuat penjelasan pasal 44 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Dalam hal penyimpanan yang bertanggung jawab ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapa pun juga. Ini hal baru, yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi kebiasaan apa yang disebut “penyitaan pakai” (*Rijden Beslag*) terhadap kendaraan bermotor. Sebagaimana dimaklum, kendaraan bermotor yang tidak dipakai dan dibiarkan baik akan rusak berkarat.

Disamping itu, diatur juga tentang pemeliharaan dan penyelesaiannya benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Benda-benda semacam itu jika masih di tangan penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Jika sudah ada ditangan pengadilan dapat dilakukan hal yang sama oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya (pasal 45 ayat 1 KUHP). Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkoba, disediakan untuk dirampas untuk negara atau dimusnahkan (pasal 45 ayat 4 KUHP). Ketentuan mengenai benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan ini, berdasarkan surat edaran Jaksa Agung nomor 15 tahun 1953 tanggal 13 juli 1953, menunjuk peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1947 jo. 43 tahun 1948.<sup>29</sup>

### E. Dasar Hukum Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Pada dasarnya seluruh aktifitas dan kegiatan harus berdasarkan pada norma Hukum yang ada, Tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan regulasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Melalui Peraturan tersebut mengatur tentang regulasi pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang menjelaskan bahwa dalam BAB III Tentang

<sup>29</sup> Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 149



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Pasal 15. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan barang sitaan Negara meliputi beberapa indikator yang harus terpenuhi di antaranya penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan.<sup>30</sup> Kepala Rupbasan wajib mengelola basan dan baran dengan

cara melakukan Penyimpanan, dalam hal penyimpanan harus dilakukan pengelompokan dan pengklasifikasian sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Kemudian dalam dasar hukum yang sama untuk melakukan pengelolaan diwajibkan juga melakukan pengamanan terhadap barang sitaan dan barang rampasan agar tercegahnya hal-hal seperti pencurian, perusakan, penukaran dan pengeluaran barang sitaan dan barang rampasan secara ilegal.

Selanjutnya dalam pengelolaan hal yang harus dilakukan adalah pemeliharaan. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara wajib melakukan pemeliharaan terhadap fisik barang sitaan dan barang rampasan secara rutin dan berkala. Kemudian selain daripada penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan wajib juga dilakukan penyelamatan terhadap barang sitaan dan barang rampasan daripada bencana alam, kebakaran dan huru-hara.

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara



## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014 sudah terlaksana cukup baik. Namun masih banyak hal yang harus benahi yaitu terkait pemeliharaan dan juga jangka waktu pengelolaan. Dalam hal pemeliharaan kita dapat mengetahui bahwa pemeliharaan berjalan cukup maksimal dikarna kan adanya kelebihan benda sitaan Kendaraan Bermotor sehingga untuk pemeliharaannya kurang maksimal. Dalam hal jangka waktu pengelolaan kita juga dapat melihat bahwa jangka waktu pengelolaan barang sitaan Negara berupa Kendaraan Bermotor berjalan kurang maksimal dikarnakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) hanya sebagai tempat penitipan barang sitaan Negara dan sifatnya tidak memiliki kuasa untuk mengeluarkan benda sitaan Negara tersebut, selain itu juga dikarnakan benda sitaan Negara tersebut belum memiliki kekuatan kepemilikan benda secara yuridis.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hambatan pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal proses penyimpanan barang sitaan berupa kendaraan bermotor secara umum sudah terlaksana sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara terdapat beberapa pasal yang secara menggambarkan proses administrasi namun dalam implementasinya proses penerimaan basan berupa kendaraan bermotor sering kali terkendala waktu penerimaannya dikarenakan proses surat menyurat yang belum dilengkapi oleh pihak penitip.
- b. Untuk pemeliharaan pengelolaan terdapat hambatan berupa jumlah barang antara barang yang diterima dan dikeluarkan tidak seimbang. Lebih banyak barang yang diterima daripada barang yang dikeluarkan hal tersebut karna proses pengeluaran barang ataupun lelang mutlak menjadi hak daripada lembaga KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
- c. Jangka waktu pengelolaan barang sitaan Negara berupa Kendaraan Bermotor berjalan kurang maksimal dikarenakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara hanya sebagai tempat penitipan barang sitaan Negara dan sifatnya tidak memiliki kuasa untuk mengeluarkan benda



sitaan Negara tersebut, selain itu juga dikarnakan benda sitaan Negara tersebut belum memiliki kekuatan kepemilikan benda secara yuridis.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut:

- a. Bagi pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok agar terus melakukan upaya bagi tercapainya pelaksanaan dan tata kelola *Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Sialang Bungkok Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2014 khususnya bagi Kendaraan Bermotor*, sehingga apa yang belum terlaksana dapat menjadi perbaikan agar dapat terlaksana dengan maksimal.
- b. Bagi Pihak penitip barang sitaan dan barang rampasan agar dapat lebih memahami proses administrasi agar proses masunya baran dan basan lebih cepat dan efesien. Selain itu juga perlunya kerja sama yang baik antara Pihak penitip barang sitaan dan barang rampasan dan *lembaga KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)* agar keluarnya barang sitaan dan barang rampasan seimbang dengan masuknya baran dan basan tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, : PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Amaja, I Dewa Gede, *Ilmu Negara*, Malang: Setara Press, 2012
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Hamzah Dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KuhaP Hir Dan Komentar*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1984
- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- L. Summartini, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995/1996
- Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty : Yogyakarta, 1999
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Kencana, 2012
- P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Paturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- R.Terry, George . 2013. *Dasar-Dasar Manajemen* Jakarta: PT Bumi Aksara
- Salim, Peter dkk. 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* Jakarta: Modern English Press
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UIN Press, 1982



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

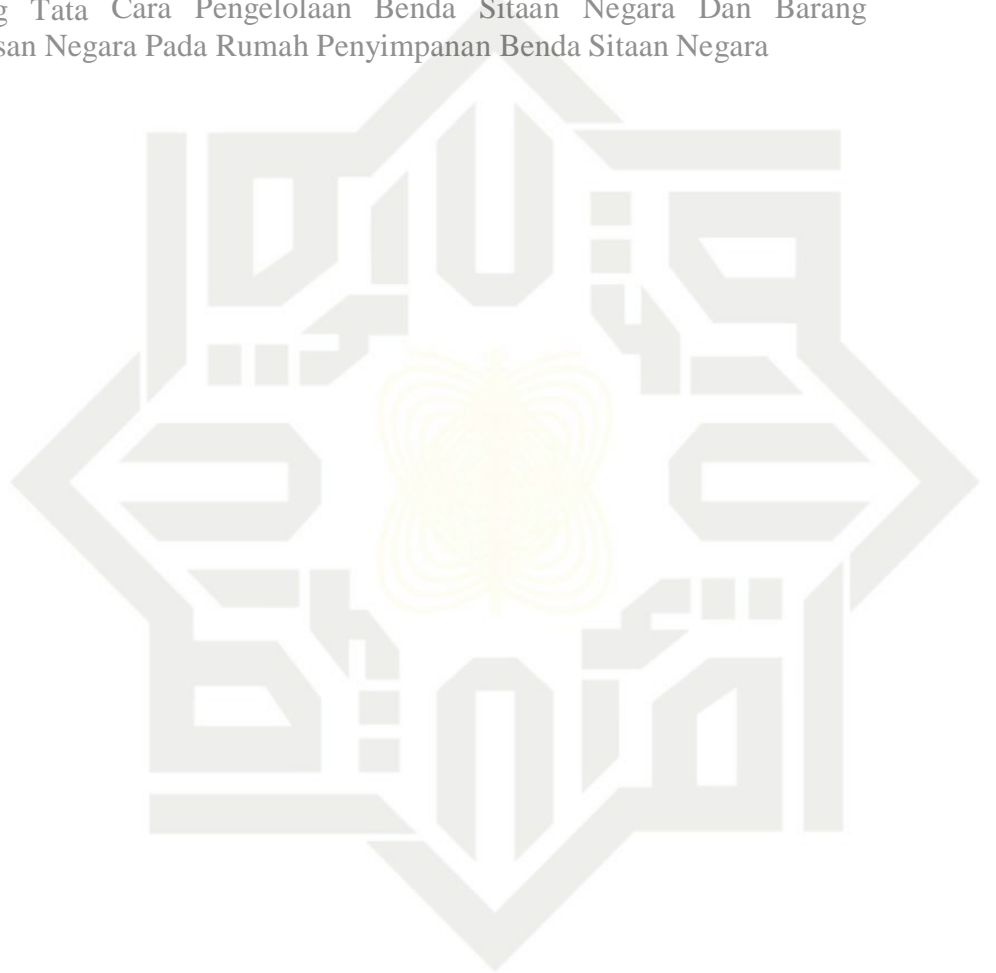
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singgono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007

Uman, Husaini. 2006 *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara

**B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara



UIN SUSKA RIAU



## DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU




## SURAT-SURAT

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2428/2021 Sifat : Biasa Lamp. : 1 (Satu) Proposal Hal : <b>Mohon Izin Riset</b>	Pekanbaru, 26 Februari 2021
--	-----------------------------

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: GENNY PRATAMA
NIM	: 11720714842
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Rupbasan Kelas I Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 : Pengelolaan kendaraan bermotor di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) kelas I pekanbaru menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 16 tahun 2014

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

  
 Dr. Des. H. Hajar, M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH RIAU**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 233  
Telp./ Fax. (0761) 23846 – 21860  
Laman: [www.riau.kemenkumham.go.id](http://www.riau.kemenkumham.go.id)

Nomor : W4-HM.02.03-1312  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

10 Maret 2021

Yth :

**Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara  
Klas I Pekanbaru**

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor: 503/DPMPSTP/NON-IZIN-RISET/39214 tanggal 2 Maret 2021 perihal Izin Riset di Rupbasan Klas I Pekanbaru, bersama ini dengan hormat kami hadapkan Dosen & Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama:

Nama : Genny Pratama  
Nim : 11720714842  
Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau

Untuk melakukan pengumpulan Riset tentang Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 di Rupbasan Klas I Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan kegiatan dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan wewenang Saudara dan disesuaikan dengan tata aturan yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
2. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sampai dengan selesai pengumpulan data yang diperlukan.
3. Setelah selesai menjalankan kegiatan tersebut, diminta perhatian Saudara untuk melaporkan hasilnya kepada kami.
4. Laporan Kegiatan yang sudah jadi agar dapat di fotocopy dan dijilid serta di berikan kepada kami, untuk bahan kajian hukum dan perpustakaan ilmiah.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan



M. Hilal  
Nip. 196905181992031001

TEMBUSAN;  
1. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU (SEBAGAI LAPORAN)  
2. ARSIP





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH RIAU  
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PEKANBARU  
Jalan Sialang Bungkok Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131  
Laman : rupbasanpekanbaru.com, Surel : rupbasanpku@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : W4.PAS.PAS.10.UM.01.10-222

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY MANSAH, S.H.  
NIP : 196512021989031001  
Pangkat/ Gol : Penata Tk. I / (III/d)  
Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GENNY PRATAMA  
NIM : 11720714842  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1  
Universitas : UIN Suska Riau

Adalah benar telah melakukan penelitian dari tanggal 10 Maret 2021 s.d 16 Juli 2021 dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"Pengelolaan Kendaraan Bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014"** dan telah membahas materi penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana perlunya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pekanbaru, 16 Juli 2021  
Kepala,

Edy Mansah  
NIP. 196512021989031001

UIN SUSKA RIAU



### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: GENNY PRATAMA

: 11720714842

: ILMU HUKUM

: Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014

Disamping : Helen Last Fitriani, SH.,MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman

yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

An. Pimpinan Redaksi

A.n. 

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010



UIN SUSKA RIAU

1. Diarag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarag mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### RIWAYAT HIDUP PENULIS



Genny Pratama Lahir di **Pekanbaru** Tanggal, **05 Mei 1999**. Anak **pertama** dari **dua** bersaudara, dari pasangan ayahanda, **Muhammad Isis** dan Ibu **Elvida Susanti** Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri **033 Tampan Pekanbaru** lulus pada tahun **2011**. Kemudian melanjutkan pendidikan di **Sekolah Menegah Pertama 21 Pekanbaru** lulus pada tahun **2014** , Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di **Sekolah Menegah Atas Negeri 5 Pekanbaru** dan lulus pada tahun **2017**. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “**Pengelolaan Kendaraan Bermotor Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014**”. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 27 Juli 2021 jurusan Ilmu Hukum dengan IPK terakhir 3.43 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).